



Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Dana Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Mangunsari 01

Krisna Arfandi

Universitas Negeri Semarang

Bintang Fajar Dwi Nugroho

Universitas Negeri Semarang

Wafa Ulum Ma'arif

Universitas Negeri Semarang

Kurniawan Aprilianto

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: krisna00arfandi@students.unnes.ac.id¹,

fajardwinugrohobintang@students.unnes.ac.id², wafaarif285@students.unnes.ac.id³,

krnawnapr122@students.unnes.ac.id⁴

Abstract. *The management of educational funds is a critical factor in supporting the smoothness of the learning process and improving the quality of education. This study aims to analyze the leadership strategies of the principal in managing educational funds at SDN Mangunsari 01. A mixed-methods approach was employed to gather qualitative and quantitative data through observation, interviews, documentation, and analysis of official financial documents. The results indicate that the principal implements a participatory, transparent, and accountable BOSB (School Operational Assistance) fund management strategy by involving teachers, the school committee, and other stakeholders. Budget planning is conducted through deliberative meetings; fund disbursement follows regulatory guidelines; and financial reports are openly communicated to parents and the wider community. Although the management practices are deemed effective, challenges remain, such as limitations in the financial information system and delays in government disbursements. This study offers practical recommendations to enhance the capacity of the fund-management team, strengthen transparency through digitalized reporting, and establish contingency mechanisms for anticipated funding delays.*

Keywords: *School Principal Leadership, BOSB Fund Management (School Operational Assistance Fund Management), Good Governance, Transparency, Participation*

Abstrak. Pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan di SDN Mangunsari 01. Pendekatan mix method digunakan untuk memperoleh data secara kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen resmi. Hasil menunjukkan bahwa kepala sekolah menerapkan strategi pengelolaan dana BOSB (Biaya Operasional Satuan Pendidikan) secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan guru, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Proses perencanaan anggaran dilakukan melalui musyawarah, pelaksanaan dana dilakukan sesuai regulasi, serta laporan keuangan disampaikan secara terbuka kepada orang tua dan masyarakat. Meskipun pengelolaannya dinilai efektif, masih ada tantangan seperti keterbatasan sistem informasi keuangan dan adanya keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola, memperkuat transparansi melalui digitalisasi laporan, serta membangun mekanisme antisipasi keterlambatan dana.

Kata kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pengelolaan Dana BOSB, Good Governance, Transparansi, Partisipasi

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Keberhasilan sistem pendidikan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, kurikulum yang relevan, dan manajemen pendanaan yang efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh (Suharno et al., 2020) dalam penelitiannya, pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan finansial yang memadai serta pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana pendidikan yang efektif menjadi salah satu prasyarat utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anggaran pendidikan di Indonesia, meskipun telah ditetapkan minimal 20% dari APBN, masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan efektivitasnya. Data dari UNESCO Institute for Statistics pada tahun 2023 menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan Indonesia sebesar 3,6% dari PDB masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (4,5%), Thailand (4,1%), dan Vietnam (4,2%). Keterbatasan ini mengharuskan adanya strategi pengelolaan dana pendidikan yang optimal, terutama di tingkat satuan pendidikan dasar, untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Prisilla R et al., 2023.)

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin di tingkat satuan pendidikan menjadi sangat strategis dalam konteks pengelolaan dana pendidikan. Menurut (Muh Fitrah, 2017.), kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor determinan dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang efektif. Sejalan dengan itu, (Cavin Gilbert, 2024.) mengungkapkan bahwa kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam aspek keuangan akan mampu mengarahkan alokasi sumber daya untuk mendukung prioritas-prioritas pembelajaran yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Di Indonesia, pendanaan pendidikan untuk sekolah dasar sebagian besar bersumber dari Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS dialokasikan untuk mendukung berbagai komponen operasional sekolah, termasuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, pengembangan profesi guru, dan perawatan sarana prasarana pendidikan. Implementasi kebijakan BOS ini telah secara signifikan membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat, namun tantangan dalam pengelolaannya masih tetap ada, terutama terkait dengan efektivitas dan transparansi penggunaan dana (Mahmudah Nono Hery Yoenanto, 2023.).

Penelitian yang dilakukan oleh (Yusra et al., 2021) mengungkapkan bahwa kemampuan kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah berkorelasi positif dengan kualitas layanan pendidikan. Studi tersebut menemukan bahwa kepala sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial keuangan yang baik cenderung mampu mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Namun demikian, (Widyastuti et al., 2022) mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi di kalangan kepala sekolah dalam hal pengelolaan keuangan pendidikan, yang berpotensi menghambat efektivitas penggunaan dana untuk peningkatan mutu pendidikan.

Strategi kepemimpinan dalam pengelolaan dana pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran yang partisipatif, alokasi sumber daya yang

proporsional, implementasi sistem pengendalian internal yang efektif, hingga monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran (Maulidiah, 2023.). Kepala sekolah yang visioner akan mampu mengintegrasikan pengelolaan dana pendidikan dengan visi dan misi sekolah, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana pendidikan, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan, menjadi standar yang harus diimplementasikan oleh kepala sekolah (Rahman & Hayati et al, 2022.). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Maulidiah, 2023.).

Sekolah Dasar Negeri Mangunsari 01 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kawasan dengan karakteristik sosial-ekonomi siswa yang beragam. Sebagai institusi pendidikan dasar, SDN Mangunsari 01 menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan sekolah. Dalam konteks ini, strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola dana pendidikan menjadi faktor krusial yang perlu dikaji secara mendalam (Yusra et al., 2021).

Studi terdahulu yang dilakukan oleh (Mahmudah Nono Hery Yoenanto, 2019) tentang implementasi kebijakan BOS di sekolah dasar menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan dana pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas kepala sekolah dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan.

Sementara itu, penelitian (Widyastuti et al., 2022) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar, termasuk keterbatasan pemahaman tentang regulasi keuangan dan minimnya sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Mangunsari 01. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dana pendidikan yang diterapkan oleh kepala sekolah, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan model kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar.

KAJIAN TEORITIS

- a. **Kepemimpinan dan Manajemen Keuangan Sekolah**
Kepemimpinan kepala sekolah berperan sentral dalam memastikan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Yusra et al. (2021) menunjukkan bahwa kepala sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial keuangan yang memadai mampu mengoptimalkan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas layanan dan kondisi pembelajaran. Namun, Widyastuti et al. (2022) mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi SDM di kalangan kepala sekolah yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan dana berbasis kinerja.

- b. Strategi Kepemimpinan dalam Pengelolaan Dana Menurut Maulidiah (2023), strategi kepemimpinan dalam pengelolaan dana mencakup:
- Perencanaan Partisipatif: Melibatkan guru, komite, dan stakeholder melalui musyawarah agar alokasi anggaran sesuai kebutuhan riil.
 - Pengendalian Internal: Penerapan sistem kontrol, seperti ARKAS dan dokumentasi resmi, untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi.
 - Monitoring & Evaluasi: Pengawasan berkala oleh dinas pendidikan dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjaga integritas penggunaan dana.
- c. Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Good governance menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Rahman & Hayati et al. (2022) menegaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini meningkatkan kepercayaan publik dan membangun budaya organisasi yang mendukung mutu pendidikan berkelanjutan. Maulidiah (2023) menambahkan bahwa tata kelola yang baik juga mencakup fleksibilitas pemanfaatan dana sesuai Permendikbud No. 6/2021, asalkan tetap mematuhi aturan keuangan negara.
- d. Regulasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSB) Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dana BOSB dialokasikan untuk membiayai biaya non-pegawai: ATK, ekstrakurikuler, pemeliharaan sarana, hingga pelatihan guru. Sekolah diberikan fleksibilitas penggunaan selama sesuai Kerangka Akuntansi Pemerintah dan mekanisme KAPODI per 31 Agustus setiap tahun.
- e. Transparansi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Transparansi dilaksanakan dengan memaparkan laporan keuangan dalam rapat orang tua, papan pengumuman, dan—idealnya—platform digital. Ristya (2013) dan Yusra et al. (2021) menekankan bahwa partisipasi aktif komite sekolah dan guru sebagai variabel moderasi memperkuat akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan dana.
- f. Pendekatan Mix-Methods untuk Validitas Temuan Vebrianto et al. (2020) memaparkan bahwa metode campuran kualitatif–kuantitatif (mix-methods) memungkinkan peneliti menggali kedalaman fenomena sekaligus mengukur variabel secara terstruktur. Triangulasi data (observasi, wawancara, dokumen) yang diuraikan Vera Nurfajriani et al. (2024) meningkatkan reliabilitas dan validitas temuan dengan membandingkan dan memverifikasi berbagai sumber data.

Dengan kerangka teori ini, penelitian akan menelaah bagaimana kepala sekolah di SDN Mangunsari 01 menerjemahkan teori kepemimpinan dan good governance ke dalam praktik pengelolaan dana BOSB yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yaitu penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut (Vebrianto et al., 2020), pendekatan mix method mengintegrasikan dua jenis data tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Data yang dikumpulkan meliputi hasil observasi, wawancara, foto, analisis dokumen, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain yang relevan, kemudian dianalisis dengan dukungan dari referensi literatur.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemanfaatan data sekunder yang diperoleh melalui instrumen tertentu. Instrumen utama dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel pembiayaan operasional pembelajaran di sekolah. Indikator yang digunakan untuk menilai optimalisasi dana BOS berasal dari beberapa pihak seperti kepala sekolah di SD Negeri Mangunsari 01.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden utama, yaitu kepala sekolah, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen resmi terkait pengelolaan dana operasional sekolah sesuai standar keuangan pendidikan. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah. Untuk pengumpulan data, digunakan beberapa teknik, yaitu wawancara guna mendapatkan informasi mengenai strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam mengoptimalkan dana BOS. Teknik dokumentasi dilakukan dengan merekam atau mencatat informasi berupa dokumen tertulis, gambar, atau karya lain yang memiliki nilai historis atau informatif. Observasi juga dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai kondisi riil pelaksanaan anggaran BOS dan kesesuaiannya dengan standar pembiayaan sekolah.

Dalam proses analisis data, peneliti menerapkan langkah-langkah reduksi data, yaitu penyaringan informasi yang relevan dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Selain itu dilakukan penyajian data yang telah diproses, dan tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil yang telah tersaji. Sebagai upaya untuk meningkatkan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, seperti hasil observasi dibandingkan dengan dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian antara data hasil wawancara, dokumen pendukung, dan temuan observasi (Vera Nurfajriani et al., 2024)

Informan utama dalam penelitian ini terdiri kepala sekolah sedangkan informan pendukung meliputi dokumen-dokumen dan hasil observasi terkait tata kelola dana BOS di SD Negeri Mangunsari 01. Meskipun penekanan utama penelitian ini bersifat kualitatif, namun juga dilengkapi dengan analisis kuantitatif sebagai alat bantu dalam pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan data numerik yang memberikan gambaran kuantitas dari fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri Mangunsari 01 diperoleh sebagai berikut:

No	Indikator	Keterangan
1	Biaya Operasi Nonpersonalia	Ya

2	Biaya Alat Tulis Sekolah	Ya
3	Biaya Daya dan Jasa	Ya
4	Biaya Konsumsi	Ya
5	Biaya Asuransi	Ya
6	Biaya Pelaporan	Ya
7	Biaya Pembinaan siswa/ ekstrakurikuler	Ya
8	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan	Ya
9	Biaya Pelaporan	Ya
10	Biaya Alat dan Bahan Habis Pakai	Ya

Tabel 1 Hasil Observasi

Berdasarkan hasil temuan, seluruh komponen pembiayaan yang diperlukan oleh sekolah telah terpenuhi secara menyeluruh, dengan tingkat pemenuhan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program yang telah direncanakan oleh pihak sekolah dapat direalisasikan sepenuhnya tanpa mengalami hambatan berarti. Cakupan pembiayaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti biaya pengadaan material, perlengkapan sekolah, alat dan bahan yang bersifat habis pakai, pemeliharaan serta perbaikan ringan, pembayaran listrik dan jasa, transportasi atau perjalanan dinas, layanan konsumsi, asuransi, pelatihan untuk siswa atau kegiatan non-pembelajaran, serta kebutuhan administrasi pelaporan.

Untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana pembiayaan pendidikan dikelola, proses analisis dilakukan melalui wawancara langsung dengan kepala sekolah.

No	Pernyataan	Jawaban Responden
1	Bagaimana Bapak mendefinisikan peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah?	Peran kepala sekolah salah satunya adalah mengelola semua kegiatan sekolah, termasuk pembiayaannya. Namun, kebijakan tidak sepenuhnya ditentukan oleh saya sendiri. Kami selalu melibatkan musyawarah dan masukan dari guru-guru serta komite sekolah.
2	Apakah Bapak memiliki prinsip tertentu untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan?	Ya, tentu saja. Kami menggunakan buku sebagai panduan dalam pengelolaan dana. Hal utama yang harus dipertanggungjawabkan adalah penggunaan anggaran dari BOSB (Biaya Operasional Satuan Pendidikan). Dulu disebut BOS (Bantuan Operasional Sekolah),

sekarang istilahnya hanya berganti, tapi esensinya sama.

3	Lalu, apa saja pos-pos pembiayaan yang bisa dibiayai dengan dana BOSB, dan apa saja yang dilarang?	Dana BOSB digunakan untuk membiayai operasional sekolah seperti pembelian ATK, biaya kegiatan siswa, alat kebersihan, peralatan sekolah, hingga belanja modal seperti laptop. Untuk larangan, umumnya tidak boleh digunakan untuk gaji atau honorarium yang tidak sesuai aturan.
4	Apakah ada pernah terjadi konflik atau perbedaan pendapat dalam pengelolaan keuangan, misalnya antara Bapak dan guru-guru? - ATK - Kegiatan siswa - Alat kebersihan - Belanja modal	Sebelum membuat rencana anggaran, kami selalu melakukan rapat musyawarah bersama guru-guru dan komite sekolah. Semua usulan dicatat dan dibicarakan secara bersama. Misalnya, untuk kebutuhan seperti: Dengan begitu, jarang terjadi perselisihan karena semua sudah dibicarakan sebelumnya. Meskipun terkadang ada perubahan anggaran karena kondisi tertentu, kami tetap dibatasi oleh sistem ARKAS (Aplikasi Rencana Kebutuhan Sekolah)
5	Bagaimana mekanisme pencairan dana BOSB?	Penyalurannya didasarkan pada jumlah murid yang tercatat di aplikasi KAPODI per tanggal 31 Agustus. Data tersebut dikunci dan menjadi dasar besaran dana yang diterima sekolah untuk tahun berikutnya. Saat ini, besar dana per siswa sekitar Rp900 ribu per tahun. Biasanya dana langsung ditransfer ke rekening sekolah dari pemerintah pusat.
6	Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOSB?	Yang bertanggung jawab secara formal adalah kepala sekolah, meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh bendahara. Kepala sekolah tetap memberikan arahan dan kontrol terhadap penggunaan dana tersebut.
7	Bagaimana prosedur penyusunan dan pelaporan keuangan tahunan di sekolah ini?	Setiap kali ada rapat wali murid, kami paparkan anggaran dan penggunaannya. Selain itu, laporan juga kami tempel di papan pengumuman sekolah, meskipun kami belum memiliki papan khusus. Terkadang cukup dengan kertas yang ditempelkan di ruang guru atau kantor.
8	Apakah Bapak memiliki saran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah?	Saran saya, semua laporan harus bisa diakses oleh wali murid dan masyarakat luas. Bisa melalui website sekolah atau media digital lainnya. Selain itu, pelatihan rutin untuk bendahara dan tim pengelola keuangan sangat penting agar laporan keuangan lebih rapi dan sesuai aturan.

9	Apakah ada pemeriksaan berkala terhadap laporan keuangan sekolah?	Ya, setiap tahun pasti ada pemeriksaan dari dinas pendidikan, Inspektorat, atau bahkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), meskipun
		pemeriksaan BPK biasanya dilakukan secara acak. Jika ditemukan penyelewengan, maka ada sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Tabel 2 Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa peran kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah sangat krusial dan melibatkan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk para guru, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Kepala sekolah menekankan bahwa meskipun ia memegang tanggung jawab utama dalam hal pengelolaan keuangan, setiap keputusan penting diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara dan pendapat didengar dan dipertimbangkan, tetapi juga untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan dana sekolah. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih komprehensif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi seluruh komunitas sekolah.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana, terutama dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSB). Anggaran ini mencakup berbagai pos pembiayaan yang penting, seperti pembelian alat tulis kantor, penyelenggaraan kegiatan siswa, pengadaan alat kebersihan, serta belanja modal yang mencakup peralatan teknologi seperti laptop. Dengan demikian, setiap alokasi dana dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan prioritas yang telah disepakati bersama, sehingga penggunaan dana dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi proses pembelajaran.

Mekanisme pencairan dana BOSB diatur dengan cermat berdasarkan jumlah murid yang terdaftar dalam aplikasi KAPODI, di mana dana yang diterima oleh sekolah ditransfer langsung dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab formal atas pengelolaan dana tersebut, meskipun pelaksanaan sehari-hari dikelola oleh bendahara sekolah yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan dana tercatat dengan baik. Prosedur penyusunan dan pelaporan keuangan tahunan dilakukan dengan cara yang transparan, di mana laporan mengenai anggaran dan penggunaannya disampaikan dalam rapat dengan wali murid dan juga dipajang di papan pengumuman sekolah. Meskipun saat ini belum ada papan khusus untuk informasi tersebut, upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tetap dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melalui pertemuan rutin dan komunikasi langsung dengan orang tua siswa.

Kepala sekolah juga memberikan beberapa saran konstruktif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Salah satu saran tersebut adalah menyediakan akses yang lebih luas terhadap laporan keuangan bagi wali murid dan masyarakat melalui platform digital seperti website sekolah. Dengan adanya akses yang lebih mudah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penggunaan dana yang ada. Selain itu, pelatihan rutin bagi bendahara dan tim pengelola keuangan dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan rapi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

Di samping itu, adanya pemeriksaan berkala dari dinas pendidikan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan sekolah. Pemeriksaan ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga memberikan sanksi yang tegas bagi setiap penyelewengan yang mungkin terjadi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana pendidikan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan keuangan sekolah dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab, dan pada akhirnya, dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Secara keseluruhan, pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, di mana semua pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai komunitas yang saling mendukung dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek penting dalam menjamin kelangsungan serta kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Keterlibatan pemerintah, dinas pendidikan, dan pengelola sekolah menjadi faktor utama agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan tepat guna (Kemendikbud, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS dialokasikan untuk membiayai belanja nonpegawai yang mendukung penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun, termasuk biaya pembelajaran, evaluasi, ekstrakurikuler, hingga pemeliharaan sarana prasarana. (Kemendikbud, 2021.) Selain itu, sekolah juga diberikan fleksibilitas dalam menggunakan dana ini selama sesuai dengan aturan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan program pembelajaran secara sistematis, sekolah biasanya menyusun dokumen perencanaan seperti Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai panduan operasional (Rosni, 2021). Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan semua aktivitas sekolah dapat berjalan sesuai target dan prioritas anggaran.

Namun dalam praktiknya, banyak sekolah menghadapi kendala finansial karena keterlambatan pencairan dana BOS. Menurut penelitian (Yuliani et al., 2022), Ketergantungan sekolah terhadap dana BOS membuat mereka rentan terhadap gangguan

operasional jika terjadi keterlambatan pencairan, yang pada akhirnya menyebabkan program pembelajaran tidak berjalan sesuai jadwal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sekolah dituntut untuk memiliki strategi antisipatif yang inovatif dan bertanggung jawab. Beberapa solusi yang telah diterapkan oleh beberapa sekolah antara lain:

1. Memanfaatkan dana kas sosial atau dana kesejahteraan guru sebagai cadangan darurat,
2. Menggunakan dana titipan orang tua siswa kelas akhir sebelum dana BOS dicairkan,
3. Memanfaatkan dana insentif kepala sekolah untuk kebutuhan mendesak,
4. Meminjamkan dana pribadi bendahara sebagai talangan sementara (Perdana, 2021)

Langkah-langkah ini meskipun bersifat sementara, harus tetap dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi kepala sekolah dan tim pengelola dana BOS untuk memiliki rencana kontingensi atau contingency plan yang bisa langsung diaktifkan ketika terjadi gangguan penyaluran dana (Mutu Pendidikan, 2024).

Selain itu, partisipasi aktif komite sekolah dalam pengambilan keputusan penggunaan dana BOS dan transparansi dalam proses tersebut merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Setiap alokasi dana harus melalui rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Fatimah et al., 2023.).

Namun, tantangan distribusi dana BOS masih menjadi masalah utama, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), di mana alokasi dana tidak selalu proporsional dengan jumlah peserta didik dan kompleksitas kebutuhan operasional sekolah. Kondisi ini menuntut penyesuaian kebijakan agar dana BOS dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pemerataan pendidikan di daerah-daerah tersebut (Sumual, 2024.). Selain itu, kendala administratif seperti keterlambatan pengumpulan data dan pergantian kepala sekolah juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana BOS, sehingga berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar di sekolah (Susanti et al., 2024.).

Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS yang profesional dan terencana sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan di tingkat sekolah. Kepala sekolah dan pengelola dana BOS harus memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk merancang, mengelola, dan mengantisipasi segala risiko terkait pengelolaan dana ini agar program pendidikan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan (Sudarya et al., 2023.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan dana pendidikan di SDN Mangunsari 01 telah dilaksanakan dengan baik melalui pendekatan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sebagai koordinator utama dalam pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah tidak bertindak secara sepihak, melainkan selalu melibatkan guru-guru dan komite sekolah dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSB) dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, mencakup berbagai pos

pembiayaan penting seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), penyelenggaraan ekstrakurikuler, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga pelatihan siswa.

Meskipun secara umum pengelolaan dana sudah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah, yang kerap mengganggu kelancaran program sekolah. Selain itu, sistem informasi pengelolaan keuangan di sekolah masih terbatas, sehingga menyulitkan dalam hal monitoring dan pelaporan. Tidak kalah pentingnya, kapasitas sumber daya manusia, khususnya bendahara dan tim pengelola dana, masih membutuhkan peningkatan melalui pelatihan berkala agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan sesuai standar keuangan pendidikan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya strategis seperti peningkatan kapasitas pengelola sekolah melalui pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan keuangan, serta penyusunan rencana kontingensi yang bisa diaktifkan ketika terjadi gangguan finansial. Dengan pendekatan yang profesional dan kolaboratif, pengelolaan dana pendidikan tidak hanya akan meningkatkan mutu layanan pendidikan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

4. Efektifitas Good School Governance Melalui Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris SMPMTs di Banyuwangi). (2024).
111-Article Text-1025-1-10-20240428. (2022).
- Mahmudah Nono Hery Yoenanto, S. (2023). STRATEGI PENDIDIKAN DASAR UNTUK MENCAPAI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN.
- Maulidiah, F. (2020). Manajemen Pengelolaan Keuangan Dana Operasional Sekolah (Bos) Sebagai Upaya Mewujudkan Good School Governance (Gsg) Pada Sekolah Dasar.
- Muh Fitrah, O. (2019). PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN.
- Pendidikan, J., Pengabdian Kepada Masyarakat, D., Nugraha, A., Khoiriah Hairani, N., & Prisila, R.
- (n.d.). STRATEGI PENGELOLA DANA BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS. 3(2), 75–80.
<https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 (1). (2021).
- Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges. In *Children and Youth Services Review* (Vol. 115). Elsevier Ltd.
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya, D. (2020). Bedelau: Journal of Education and Learning Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology. In *Bedelau: Journal of Education and Learning* (Vol. 1, Issue 1).
- Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Widyastuti, A., Titong, W. O., & Ulum, I. (2022). Kompetensi SDM Sebagai Mediasi Dalam Good Governance Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 378–397.

- Yusra, M., Afni Yunita, N., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Visioner & Strategis*, 10(1).
- Ristya, D. A. (2013). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*,
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya, D. (2020). Mixed methods research: Trends and issues in research methodology. *Bedelau: Journal of Education and Learning*, 1(1), 63–73.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afghani, M. W. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Syarfuddin, R., Rahmattullah, & Akmaluddin. (2024). Efektivitas penggunaan dana BOSP pada sekolah dasar negeri dalam peningkatan mutu pendidikan berdasarkan model CIPP di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Visi Pena*, 2024(Special Issue), 53–74.
- Salsabila, S. S., & Handoko, B. (2020). Analisis pengelolaan administrasi keuangan sekolah: Tinjauan terhadap kemampuan SDM dengan rangkap jabatan pada MI Cigitung Kabupaten Bandung Barat. Universitas Teknologi Digital Bandung. [URL tidak tersedia]
- Sufriadi, D. (2025). Optimalisasi dana BOS dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Carong: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(1), 518–528.
- Rosni. (2021). Kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal EDUCATION (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 7(2), 113–124.
- Satria Perdana, N. (2021). Implementasi model kepemimpinan situasional: Kebijakan Merdeka Belajar tentang relaksasi dana BOS dan dampaknya terhadap aksesibilitas pendidikan. *DE_JOURNAL (Dharma's Education Journal)*, 2(2), 337–348.
- Putri, P. S. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Fajarronansyah, M. (2023). Analisis manajemen kepala sekolah dalam mengelola dana BOS terhadap efektivitas pembelajaran di SMK 11 Muaro Jambi (Tesis, Universitas Jambi). [URL tidak tersedia]